

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi harus memiliki mekanisme sistem pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *Cratos*, *Demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintahan. Ir. Soekarno: ... “Apakah Demokrasi itu ? Demokrasi adalah pemerintahan rakyat”. Dimana sistem pemerintahan kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaan dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih (*government of people, by people, for people*).¹ Demokrasi sebagai asas kenegaraan yang telah memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Demi mewujudkan negara demokrasi yang baik, maka pemilihan umum harus diadakan pemilihan umum (PEMILU) adalah salah satu dari tolak ukur keberhasilan dari sistem demokrasi yang terdapat di negara demokrasi seperti di Republik Indonesia. Merupakan kehendak mutlak untuk dijadikan sebagai pelaksana bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi.

Dalam sistem politik yang demokratis, *plurarisme* merupakan satu panduan prinsipil yang mengakui kehidupan bersama yang damai dalam perbedaan kepentingan, keyakinan, dan gaya hidup. Tidak seperti totalitarianism atau partikularisme, *plurarisme* mengakui “perbedaan kepentingan” dan

¹ Tim Ahli Seknas Jokowi, 2014, *Buku Jalan Kemandirian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Hlm 211

menganggapnya sah bagi anggota masyarakat untuk bekerja atas dasar kesadaran mereka, mengemukakannya dalam proses konflik dan dialog.²

Partai politik merupakan anggota kelompok yang terorganisir sesuai dengan ideologi yang bertujuan untuk merebut, mempertahankan kekuasaan dalam setiap pesta demokrasi melalui kebijakan partai yang mereka susun. Cara merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara kombinasi antar kepentingan masyarakat melalui pemilihan umum dan dengan cara yang sah menurut aturan undang-undang yang berlaku.

Partai politik menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah yang didefinisikan seperti mata rantai yang saling menguntungkan. Fungsi partai politik mengkomunikasikan berbagai aspirasi rakyat dengan keberagaman cara berfikir dan cara pandang masyarakat yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Jokowi yang dicalonkan oleh PDI-Perjuangan sebagai calon presiden memiliki daya tarik tersendiri yang kuat untuk diteliti karena calon non-struktural partai, yang merupakan figur memulai dengan karir dari jabatan politik sebagai Walikota Surakarta, kemudian terpilih sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Langkah yang diambil PDI-P untuk mengusung Jokowi adalah keputusan yang berani dan mengejutkan banyak pihak karena partai yang dibangun sejak awal reformasi melekat predikat sebagai kendaraan politik trah Soekarno, terutama keluarga Megawati Soekarnoputri.

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden³, Pasal 9 mengatur tentang persyaratan calon

² Soyomukti, Nurani, 2016, *Pengantar Sosiologi*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA), Hlm 418

presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pilpres 2014 berlangsung satu putaran setelah Partai Golkar memastikan tidak membentuk poros baru bersama Partai Demokrat. Dengan demikian, ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yaitu Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pasangan Jokowi-JK didukung oleh lima parpol dengan memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR. Sementara pasangan Prabowo-Hatta memperoleh dukungan 48,93 persen suara atau 292 kursi DPR. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam Pilpres 2014 dapat dipastikan bahwa tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presidenya sendiri, sehingga partai politik harus melakukan koalisi untuk bisa mengajukan capres dan cawapresnya.

PDI-Perjuangan sebagai partai pemenang pada pemilu hanya mendapatkan 18,95% suara nasional yang mengukung Jokowi sebagai capresnya. Berbagai manufer politik dilakukan oleh para elit partai diantaranya, partai Golkar yang menjajaki koalisi dengan PDI-P serta dengan Gerindra melalui berbagai pertemuan dengan Jokowi dan Prabowo Subianto. Sehingga ada dua kandidat kuat calon presiden yaitu Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta serta Prabowo Subianto

³ Lihat Lengkap Di *UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Di Akses 26 Februari 2019, Pukul 21.00 WIB

Ketua Dewan Pembina partai Gerindra. Namun untuk mengusung mereka menuju pemilu presiden tetap harus menggunakan koalisi partai.

Pada tanggal 19 Mei 2014, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura mendeklarasikan penetapan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Gedung Joang 45, Menteng (Koalisi Indonesia Hebat). Sementara itu pesaing pasangan Jokowi-JK yaitu Prabowo-Hatta juga telah mendeklarasikan diri. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa resmi dideklarasikan oleh enam partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden (Koalisi Merah Putih). Keenam partai politik tersebut adalah Gerindra, PKS, PAN, PPP, dan Partai Golkar. Deklarasi yang dihadiri 6 pimpinan partai politik disampaikan di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur hari Senin, 19 Mei 2014.⁴ Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden.

Kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seseorang kandidat. Kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang di tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya. Sebagai partai pengusung Jokowi, PDI-P mempunyai tentara partai atau yang sering disebut sebagai Regu Penggerak Pemilih (Guraklih).

⁴ Lihat https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan_umum_presiden_indonesia_2014, Di Akses 26 Februari 2019, Pukul 23.00 WIB

Guraklih merupakan tentara partai dalam proses mengidentifikasi pemilih potensial calon yang diusung oleh partai dalam pilkada atau pemilih potensial dalam pemilu yang belum terdaftar dalam DPS/DPT. Melaporkan kecurangan dan pelanggaran dalam masalah DPS/DPT, seperti penggelembungan daftar pemilih, pemilih fiktif, pemilih anak-anak yang tidak mempunyai hak memilih, pemilih meninggal dunia, dsb. Rekrutment Guraklih dilaksanakan oleh PAC Partai, dalam merekrut Guraklih, PAC partai berkoordinasi dengan Ranting Partai diserahkan kepada BSPN cabang dan DPC partai melalui PAC. Menurut Peraturan partai no. 14 tahun 2015 tentang rekrutmen, seleksi, pelatihan, pembinaan, pengorganisasian saksi partai dan pelaksanaan pengamanan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peraturan partai No. 15 tahun 2015 tentang badan-badan partai diatur dalam pasal 34 sampai dengan pasal 40.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dalam pesta demokrasi pemilihan presiden sebagai agenda rutin lima tahunan menarik untuk diteliti. Ada beberapa alasan yang mendukung ketertarikan penulis untuk meneliti pemilihan presiden tersebut. Pertama, pemilihan presiden tahun 2014 di ikuti peserta dari purnawiraan dan mantan walikota solo serta mantan gubernur. Kedua, walaupun pemilihan presiden sudah dilakukan tahun sebelumnya, menurut penulis ada yang menarik pada pemilihan tahun 2014 ini yaitu adanya Guraklih dari partai pengusung calon presiden dan wakil presiden dari partai berlambang banteng. Bertitik tolak dari

⁵ Lihat lengkap di www.pdiperjuangan.id, *Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN)*. Diakses Pada Kamis 31 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

latar belakang tersebut, penulis memilih permasalahan yang dirumuskan dalam judul penelitian “*Manajemen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemenangan Jokowi-JK Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil presiden Tahun 2014* di DPC PDI-Perjuangan kabupaten Mojokerto Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian riil diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara memberdayakan sumber daya partai politik dalam kemenangan Jokowi-JK pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?

1.3 Tujuan penelitian

Bedasarkan fenomena yang ada, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

1. Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan melalui Partai Politik Peserta Pemilu PDI-Perjuangan.

2. Khusus

Untuk mengetahui perkembangan sistem kepartaian Indonesia melalui PDI-Perjuangan di Kabupaten Mojokerto dalam manajemen partai politik dalam kemenangan JOKOWI-JK pada PILPRES 2014.

1.3 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti :

Satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (satu) pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit.

2. Bagi akademik :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, ataupun sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan lingkup temporal, spasial, dan materi. Ruang lingkup temporal berkaitan dengan batasan waktu kajian yang akan dibahas. Ruang lingkup spasial berkaitan dengan batasan wilayah yang akan dikaji, sedangkan ruang lingkup materi adalah batasan-batasan permasalahan yang akan dikaji. Lingkup temporal dalam penelitian ini adalah tahun 2014. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Mojokerto, Lingkup materi dalam penelitian ini menekankan pada strategi Guraklih PDI-P dalam melaksanakan pemenangan paslon yang di usung dan nama partai.

Fokus kajian dari penelitian ini adalah peneliti berusaha mengkaji manajemen partai demokrasi Indonesia perjuangan dalam pemenangan, dimulai dari manajemen partai, kemudian habitus, modal, arena dan praktik, hingga hasil akhir pemenangan Jokowi-JK.